

No. **111** Maret- April 2015

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**Mengapa Perlu
Data Terpilah?**

**MDGs
Setahun Lagi**

**Memacu Ketertinggalan SPM
Pendidikan di Kawasan Timur
Indonesia**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057

**Asia, Politisi Perempuan Peduli
Kaum Marjinal**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTI**News** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id atau mengirimkan SMS kepada kami.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id or send us SMS.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTI**NEWS** DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH AUSTRALIA / BaKTI**NEWS** IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT OF THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA.

PANDANGAN YANG DIKEMUKAKAN TAK SEPENUHNYA MENCERMINKAN PANDANGAN YAYASAN BaKTI MAUPUN PEMERINTAH AUSTRALIA. / THE VIEWS EXPRESSED DO NOT NECESSARILY REFLECT THE VIEWS OF YAYASAN BaKTI, THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA

Daftar Isi

BaKTI**News**

Maret - April 2015

No. **111**

- 1** Program Mitra
Mengapa Perlu Data Terpilah?
- 5** MDGs Setahun Lagi
Oleh **Ivan Hadar**
- 9** Profil NGO
IDEA PROJECT
- 14** Diskusi Praktik cerdas
**Urgensi PERDA Kota Ternate
Tentang Penayangan Pornografi dan
Pornoaksi di TV Kabel**
Oleh **Thamrin Husain**
- 17** Pendidikan
**Memacu Ketertinggalan SPM
Pendidikan di Kawasan Timur
Indonesia**
Oleh **Suharto**
- 21** Sosok
**Asia, Politisi Perempuan Peduli
Kaum Marjinal**
Oleh **M. Ghufuran H. Kordi K. & Martina Majid**
- 25** Program JiKTI
**Workshop
Peningkatan Kapasitas
Peneliti Muda JiKTI NTB**
Oleh **Rio Abdul Fattah**
- 28** Update Batukarinfo.com
- 29** Program KM AIPD - BaKTI
**Hadirnya Pusat Data dalam Mendukung
Program Pembangunan Daerah**
Oleh **Junaidi dan Rahman Ramlan**
- 33** Peluang
**"Cool Weather But Warm People"
Even more beautiful than what
books or people have described**
- 37** Program BaKTI - MAMPU
**Anggota Parlemen
Pembelajar**
Oleh **M. Ghufuran H. Kordi K.**
- 40** Kegiatan BaKTI
- 41** Info Buku



Hampir 1,2 miliar warga dunia masih berlutut dalam kemiskinan, termasuk 400 juta anak yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Di Indonesia, angka kemiskinan menurun hingga 11,25%.

Foto : **Ichsan Djunaed**

MENGAPA PERLU DATA TERPILAH?



Setelah dijalankan selama 15 tahun, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah membuahkan beberapa kemajuan. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang secara politik telah menunjukkan dukungan yang nyata melalui penyusunan peraturan pelaksanaan tentang pengarusutamaan gender, meningkatnya program dan kegiatan yang responsif gender, serta meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dari tahun ke tahun.

Ilustrasi Ichsan Djunaed

Meskipun demikian, implementasi pengarusutamaan gender di Kementerian/Lembaga dan daerah belum merata dan menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun menerbitkan pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender atau disebut PPRG.

Pada 1 Oktober 2014, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan paket buku pedoman teknis untuk mendukung pembangunan gender di Indonesia. Paket buku tersebut terdiri dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dan Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisa Data Terpilah untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah.

Dalam kegiatan peluncuran buku Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisa Data Terpilah untuk Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah tersebut, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Linda Amalia Sari, menyampaikan, “Dalam pelaksanaannya, perencanaan penganggaran yang responsif gender memerlukan hasil analisis gender dengan membutuhkan yang menggunakan data terpilah, yaitu data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur sebagai data pembuka wawasan dan sekaligus sebagai input pelaksanaan analisis gender dan anak. Namun, ketersediaan data terpilah di Kementerian/Lembaga dan daerah masih sangat terbatas, dan hal ini menjadi permasalahan utama mengapa pelaksanaan PPRG menjadi terhambat”.

Terbatasnya dan atau tidak adanya data terpilah yang lengkap, ataupun tidak seragamnya pemilahan data dari tingkat kabupaten berpengaruh pada halangan dalam menyetarakan gender, termasuk melindungi dan memenuhi hak anak-anak. Buku Pedoman Teknis merupakan perangkat legal yang dapat mendorong dan meningkatkan cakupan ketersediaan data terpilah, dan analisa terhadap gender serta anak sebagai bahan pelaksanaan PPRG.

Sosialisasi Buku Pedoman Teknis di Makassar

Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) bekerja sama dengan Yayasan BaKTI mengadakan sosialisasi Buku Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisa Data

Tujuan utama dari mensosialisasikan buku ini di Makassar adalah untuk mendorong perbaikan kualitas layanan publik melalui pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender.

Terpilah untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Kantor BaKTI, Makassar pada Selasa 27 Januari silam. Kegiatan sosialisasi dan diskusi ini dilaksanakan bersama dengan para pemerhati gender dalam rangka melihat apa perlunya data terpilah.

Tujuan utama dari mensosialisasikan buku Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisa Data Terpilah untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah di Makassar adalah untuk mendorong perbaikan kualitas layanan publik melalui pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak A. Yaksan Hamzah, ibu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. A. Murlina Muallim, dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Tenri Olle Yasin Limpo.

Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak A. Yaksan Hamzah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai buku pedoman teknis pertama di Indonesia mengenai penyusunan dan analisis data terpilah dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, buku ini diharapkan dapat memandu para perencana pembangunan menyusun dan menganalisa data terpilah dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Hj. A. Murlina Muallim yang juga mengapresiasi tim penyusun buku pedoman teknis ini dan AIPD atas dukungannya sehingga buku ini dapat mendorong para perencana pembangunan untuk mengintegrasikan



pengarusutamaan gender ke dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Acara sosialisasi buku yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan dari AIPD ini menghadirkan Dr. Soedarti Surbakti, Mantan Kepala BPS yang mewakili tim penyusun buku sebagai narasumber utama. Narasumber lain dalam kegiatan ini adalah Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Nursam Salam, dr. A. Mappatoba, Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bapak Hatta Masse dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pemaparannya, Dr. Soedarti Surbakti menyebutkan bahwa buku ini sudah diujicobakan di Malang, Flores Timur dan Lombok Utara. Hasil dari uji coba tersebut bervariasi, tergantung dari respon, kesiapan dan kesigapan pemerintah

daerah setempat. Peran dari Kepala BAPPEDA, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan juga sangat menentukan keberhasilan dari pengumpulan, penyusunan dan penggunaan data terpilah dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah.

Dalam pemaparannya, dr. H. A. Mappatoba, DTAS, MBA dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan, “Data terkait pelayanan publik sektor Kesehatan seyogyanya merupakan satu kesatuan dan saling terpaut”. Hal ini diungkapkan Mappatoba dalam pembahasan mengenai tantangan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data terpilah.

“Secara hirarki pemanfaatan data dalam sektor Kesehatan di Sulawesi Selatan ditujukan untuk perubahan kebijakan, penyusunan strategi program, perencanaan program, dan pemantauan program”, imbuh Mappatoba. Beliau juga memberi



Foto : Yayasan BaKTI/Aditya Rakhmad

contoh bagaimana Dinas Kesehatan telah melakukan pengumpulan data jumlah bayi lahir sudah harus berupa data terpilah. Data tersebut dimasukkan dalam sistem pencatatan kolom kohort jenis kelamin dalam satu wilayah tertentu dan berlanjut hingga balita.

Terkait pentingnya penggunaan data terpilah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, secara politik, DPR memberikan dukungan yang cukup kuat dalam rangka kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan betul-betul memasuki kebijakan yang pengarusutamaan gender. Hal ini diungkapkan Ibu Tenri Ole, Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, dalam diskusi. Beliau mengangkat contoh Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 dimana visi dan misinya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 untuk mengarahkan kebijakan agar responsif gender.

Tak kurang dari 70 peserta menghadiri Diskusi Sosialisasi Buku Pedoman Teknis di AS Room Kantor BaKTI. Peserta berasal dari BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten di sekitar Makassar, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kepegawaian Daerah tingkat provinsi dan kabupaten, LSM pemerhati gender, akademisi, aktivis, dan rekan-rekan jurnalis. Selain di Makassar, sosialisasi buku Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisis Data Terpilah untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender ini juga diadakan di Kupang, Mataram, Surabaya, Jayapura, dan Manokwari.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Anda dapat mengunduh buku ini melalui link

<http://aipd.or.id/id/guideline-for-preparation-and-analysis-of-dissagrated-data-as-part-of-gender-mainstreaming-in-governance/>

MDG'S

SETAHUN LAGI



Ilustrasi Ichsan Djunaed

Salah satu target terpenting Millenium Development Goals (MDGs/Tujuan Pembangunan Milenium) yang diluncurkan oleh PBB pada tahun 2000, adalah memangkas jumlah orang miskin secara global menjadi tinggal separuh jumlahnya pada tahun 2015. Saat ini, persentase orang miskin global telah menurun dari angka 43 persen menjadi 21 persen, sekitar separuh jumlahnya pada tahun 1990.

Meskipun demikian, jumlah tersebut masih terbilang besar. Betapa tidak. Dengan menggunakan angka US\$ 1,25 per hari sebagai batas kemiskinan, tercatat hampir 1,2 miliar warga dunia masih berkutat dalam kemiskinan, termasuk 400 juta anak yang masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim.

Apalagi penyebab pengurangan kemiskinan global, terutama berkat perkembangan positif di Asia, khususnya China di mana selama dua dekade terakhir ratusan juta penduduknya mengalami peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

**SAAT INI, SEKITAR
SATU MILIAR
PENDUDUK DUNIA
MENDERITA
KEKURANGAN
MAKANAN -
MENINGKAT
SEKITAR 2 %
DIBANDINGKAN DENGAN
KONDISI TAHUN 1990.**



Sementara itu, gambaran positif pengurangan kemiskinan, berubah menjadi negatif ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa kelaparan di dunia semakin luas. Saat ini, sekitar satu miliar penduduk dunia menderita kekurangan makanan - sebuah peningkatan sekitar 2 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 1990. Artinya, target penurunan tingkat kelaparan menjadi separuh diprediksi tidak akan tercapai.

Beberapa target MDGs lainnya, juga belum menunjukkan perkembangan yang membesarkan hati. Janji negara-negara kaya untuk memberikan

hibah 0,7 persen dari PDB-nya untuk pencapaian MDGs di negara-negara miskin, juga hanya ditepati oleh beberapa negara Eropa. Angka kematian ibu, penyebaran HIV/AIDS dan malaria, pelestarian hutan, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi masih jauh dari harapan.

Tahun depan, tepatnya pada Oktober 2015, target waktu untuk pencapaian delapan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) akan berakhir. Kini, segala sesuatu harus dilakukan dengan segera dan cepat terkait pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, akses terhadap pendidikan dasar dan perbaikan kesehatan serta lingkungan hidup dan kerjasama global. Bagaimana dengan pencapaian MDGs Indonesia?

KONDISI INDONESIA

BPS mengukur garis kemiskinan dengan penghasilan Rp 300 ribu/orang/bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp 250 ribu/orang/bulan untuk penduduk desa. Pengukuran itu sama dengan US\$ 1.5-1.6/orang/bulan dengan patokan kurs/nilai tukar, sementara acuan internasional menggunakan patokan tarif pasar. Mengacu pada indikator tersebut, angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2014 berjumlah 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen dari total penduduk. Dibandingkan dengan September 2013, telah terjadi penurunan orang miskin dari 11,46 persen menjadi 11,25 persen.

**ANGKA KEMISKINAN
INDONESIA PADA
MARET 2014
BERJUMLAH 28,28
JUTA JIWA
ATAU TURUN
11,25 %
DARI TOTAL
PENDUDUK.**



Meskipun demikian, pada saat yang sama terjadi kenaikan terkait indeks kedalaman kemiskinan dari 1,75 persen menjadi 1,89 persen. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan yang naik dari 0,43 persen menjadi 0,48 persen (BPS, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah karena menjauhi garis kemiskinan, sementara ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

Tiga hal yang diyakini bisa mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan kelaparan (MDGs 1-2) di Indonesia adalah dengan memprioritaskan perluasan kesempatan kerja, peningkatan infrastruktur pendukung, dan penguatan sektor pertanian.

INDONESIA TELAH MENCAPAI TARGET MINIMAL MDGS UNTUK AKSES BAGI SEMUA ANAK USIA SEKOLAH UNTUK MENGECAK PENDIDIKAN 6 TAHUN.



Terkait pendidikan dasar dan melek huruf, Indonesia tercatat telah mencapai target minimal MDGs yaitu akses bagi semua anak usia sekolah untuk mengecap pendidikan 6 tahun. Bahkan lebih dari itu, negeri ini menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal.

Meskipun demikian, tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah.

Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20 persen dan 30 persen untuk Aceh dan Papua dari jumlah anggaran nasional diharapkan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal. Terkait pendidikan “gratis” yang menjadi program pemerintah, ternyata tidak sepenuhnya gratis karena masih ada biaya-biaya tertentu yang harus ditanggung siswa.

ANGKA KEMATIAN ANAK MENUNJUKKAN PENURUNAN YANG CUKUP SIGNIFIKAN, MESKI TARGET SEBESAR 23 PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP PADA TAHUN 2015 DIPERKIRAKAN BELUM BISA TERCAPI.



Sementara itu, angka kematian anak menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, meski target sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 diperkirakan belum bisa tercapai. Selain itu, masih terjadi disparitas regional dalam pencapaian target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses atas pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil. Prioritas ke depan adalah memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil.

AKI PADA 2012 MENCAPAI 359 PER 100 RIBU PENDUDUK -MENINGKAT SEKITAR 57%, PADA 2007, YANG HANYA 228 PER 100 RIBU PENDUDUK. (BKKBN, 2012).



Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah angka kematian ibu. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2012 menyebutkan, sepanjang periode 2007-2012 kasus kematian ibu melahirkan melonjak cukup tajam. Diketahui, pada 2012, AKI mencapai 359 per 100 ribu penduduk atau meningkat sekitar 57 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada 2007, yang hanya sebesar 228 per 100 ribu penduduk (BKKBN, 2012).

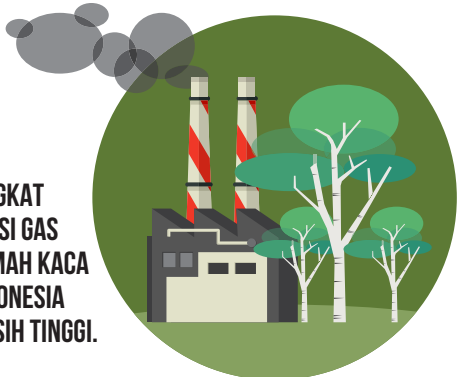
PREVALENSI HIV/AIDS MENINGKAT PADA PENGGUNA NARKOBA SUNTIK DAN PEKERJA SEKS. PENYAKIT TUBERKULOSIS MENCAPAI TARGET, KECUALI PAPUA.



Persebaran penyakit menular juga cenderung meningkat. Terjadi kenaikan prevalensi HIV/AIDS terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks.

Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target, meskipun di daerah tertentu seperti Papua malah meningkat.

TINGKAT EMISI GAS RUMAH KACA INDONESIA MASIH TINGGI.



Bagaimana dengan lingkungan hidup? Ternyata, Indonesia masih merupakan salah satu produsen emisi gas rumah kaca tertinggi.

RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM, SANITASI YANG LAYAK **JAUH** **DARI TARGET**



Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses air minum, sanitasi yang layak masih jauh dari target.

Sedangkan kemitraan global untuk pembangunan (MDG 8), memiliki dua sisi mata uang yang berbeda. Dalam meningkatkan efektifitas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Commitment telah ditandatangani bersama 26 mitra

pembangunan pada tahun 2009. Berbagai bantuan hibah, perlu dicermati agar tidak mengikat dengan pemberian utang yang membebani generasi berikut. Meskipun rasio pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB dari waktu ke waktu menurun, namun jumlah nominal utang Indonesia telah menyebabkan pembayaran cicilan utang dan bunga yang sangat membebani APBN.

AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL PASCA-2015

Menjelang berakhirnya time frame pencapaian target capaian MDGs tahun 2015, komunitas internasional di bawah PBB mulai mendiskusikan perumusan agenda pembangunan global pasca-2015. Terkait dengan upaya memformulasi Post-2015 Development Agenda, Indonesia mendukung tersusunnya *road map* bagi *intergovernmental process* guna penyusunan agenda pembangunan pasca-2015 dan berpandangan bahwa agenda dimaksud harus dibangun berdasarkan pembelajaran dan praktik-praktik terbaik dari pelaksanaan MDGs.

Kita semua sepakat agar negeri ini mendukung pandangan yang menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai visi Agenda Pasca 2015 melalui pertumbuhan dengan pemerataan yang berkelanjutan serta memberikan perhatian terhadap aspek sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Indonesia diharapkan memberikan lebih banyak kontribusi positif terhadap Agenda Pembangunan Global Pasca-2015 dibandingkan saat ini.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Anggota Pokja Forum KTI dan Direktur Eksekutif IDE (Institute for Democracy Education).

Tulisan ini juga telah dimuat di

<http://poskomalut.com/2014/12/08/mgds-setahun-lagi/>





INDONESIAN EDUCATION AND ARTS PROJECT **IDEA** PROJECT

IDEA Project adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan kesenian. Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Juni 2004 di Kota Makassar, hingga akhirnya berpindah dan memulai programnya di Kota Kendari pada tahun 2013. Kota Kendari dipilih karena beberapa alasan, yaitu masih minimnya kegiatan yang mengangkat tema seni dan budaya dari rekan-rekan Lembaga Sosial Kemasyarakatan (OSM) dan LSM di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bapak Ashari Amrullah, inisiator awal terbentuknya IDEA Project berpendapat, “Isu etnis, pragmatisme politik, serta kecenderungan hidup anak muda yang hedon menjadikan kota ini miskin identitas”.



Visi dan Misi IDEA Project dalam mendorong pembangunan masyarakat yang terdidik dan berbudaya:

- 1 Silaturahmi Sastrawan dan teaterawan asal Makassar “Asia Ramli Prapanca” bersama seniman Sulawesi Tenggara
- 2 Stand Pameran Rumah Pengetahuan, pada festival Taman Bacaan Masyarakat 2014 dalam memperingati hari Aksara

Fokus utama dalam program IDEA Project adalah memperkuat identitas budaya dan keberlanjutan seni tradisional sebagai media pembelajaran dan pembauran lintas budaya. IDEA Project memfasilitasi proses pencerdasan anak usia sekolah dan anak muda melalui program pendidikan dan seni. Dalam programnya, IDEA Project mendorong kewirausahaan sosial sebagai bagian dari peningkatan standar hidup.



Dalam mewujudkan ketiga fokus utama program, IDEA Project menterjemahkannya menjadi empat bentuk kegiatan, yaitu Rumah Pengetahuan, Forum Padamu Negeri, Wirausaha Sosial dan Pemberdayaan, serta Seni dan Budaya. Berikut uraian dari masing-masing kegiatan yang menjadi fokus IDEA Project.

RUMAH PENGETAHUAN

Bentuk layanan pendidikan lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat luas secara gratis di Kota Kendari. Kegiatan di dalam Rumah Pengetahuan ini meliputi perpustakaan, jaringan internet nirkabel, dan meja diskusi. Rumah pengetahuan ini memfasilitasi kegiatan pemutaran film, bedah buku, pelatihan seni, pameran kreativitas, dan kompetisi duta rupa.

Dalam Rumah Pengetahuan ini, IDEA Project juga melengkapi dengan fasilitas perangkat

komputer dan upaya pengadaan untuk internet. Rumah Pengetahuan ini juga sering digunakan untuk aktivitas diskusi tematik dan kelas inspirasi.

FORUM PADAMU NEGERI

Forum Padamu Negeri adalah program *outreach* IDEA Project yang diperuntukkan bagi kaum muda untuk meningkatkan pengetahuan, kreativitas, dan ketrampilan anak muda. Forum ini memfasilitasi anak muda dalam mengeksplorasi kemampuan diri dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Beragam aktivitas telah diselenggarakan, seperti event selama masa kampanye Pilpres 2014 bertajuk “Yang Muda, Bersuara”. Event ini menghadirkan beragam aktivis dan pegiat sosial seperti OKP, LSM, PARPOL, Komunitas Kreatif, dan BEM Universitas.



- 3 Diskusi dan Peluncuran Buku Puisi “Teluk Bahasa”
- 4 Seni Budaya: diskusi “Monolog Kesaksian” bersama Achmad Zain Stone
- 5 Seni Budaya: “Romansa Ramadhan”

Program Forum Padamu Negeri ini diharapkan mampu menciptakan suasana saling belajar dan berbagi antara kaum muda dari berbagai lingkungan di Sulawesi Tenggara.

WIRUSAHA SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

Program yang dirancang dalam rangka mendorong terciptanya creativentrepreneur. Program ini sebagai upaya pemberdayaan potensi anak usia muda dalam dunia kewirausahaan. Melalui program ini, IDEA Project melibatkan masyarakat yang juga tergabung dalam unit usaha lokal. Lebih dari itu,

IDEA Project juga memfasilitasi anak usia muda dalam hal perluasan akses dengan pemerintah, komunitas/lembaga sejenis, dan swasta.

SENI DAN BUDAYA

Program yang dirancang dengan mentransformasi nilai-nilai kebhinekaan berbasis budaya lokal dan ide kreatif. Program seni dan budaya ini juga bertujuan dalam membangun rasa saling memahami antar budaya dalam ragam kegiatan pertunjukkan, dialog, pameran, workshop, kolaborasi ide dan riset.

IDEA Project pernah menggelar diskusi dan peluncuran buku puisi berjudul Teluk Bahasa di Rumah Pengetahuan pada tahun 2014. Kegiatan ini didukung oleh 29 penyair dari Sulawesi Tenggara. Mendukung kegiatan di bidang seni dan budaya, mereka juga kerap menggelar



6

kegiatan-kegiatan bertajuk seni dalam bentuk diskusi, bincang budaya, serta pertunjukan seni budaya. Pertunjukan yang pernah mereka gelar adalah pertunjukan monolog berjudul “Kesaksian” oleh Acmad Zain Stone, salah seorang Teaterawan dari Kendari.

Keempat kegiatan tersebut menjadi aktivitas utama yang diselenggarakan oleh IDEA Project selama rentan waktu dua tahun terakhir ini. Seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh IDEA Project ditujukan bagi masyarakat umum, mahasiswa, wirausahawan pemula, serta pemerhati dan pelaku seni dari berbagai komunitas seni di Sulawesi Tenggara.

Dalam menjalankan programnya, IDEA Project menjalin kemitraan dengan berbagai institusi maupun mitra-mitra lokal. Kemitraan ini terjalin atas dasar kesamaan visi yang diemban oleh organisasi, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa yang berkarakter dan mendorong pembangunan yang partisipatif melalui ragam kegiatan yang terukur dan terintegrasi. Adapun mitra yang selama ini bekerja sama dengan IDEA Project adalah UPTD Museum Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Forum Taman Bacaan Provinsi Sulawesi Tenggara, laskar Sastra Universitas Haluoleo,

5 Ruang Pengetahuan

Sanggar Teko Kolaka, Sanggar Fantastik Bau-Bau, dan Trafo Unaha.

IDEA Project menjadi sebuah wadah bagi para pegiat seni dan pendidikan dalam menyatukan perbedaan budaya dan ras menjadi kesamaan pandangan. Keberadaan IDEA Project juga dirasakan manfaatnya oleh berbagai kalangan dan komunitas. Masyarakat dan komunitas kini mendapat ruang dan media dalam melakukan kegiatannya. Mereka memiliki ruang untuk berdiskusi dan saling bertukar pikiran sehubungan dengan budaya dan pendidikan. Bahkan IDEA Project kerap dijadikan base camp bagi penggiat literasi yang tergabung dalam Forum Taman Bacaan Provinsi Sulawesi Tenggara. IDEA Project memiliki beberapa volunteer yang juga aktif dalam beberapa komunitas dalam membantu aktivitas program di IDEA Project.

Foto-foto : Dok. **IDEA Project**

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih banyak mengenai program dan aktivitas **IDEA Project**, anda dapat berkunjung ke Jl. Abunawas No. 191 Kendari, Sulawesi Tenggara dan menghubungi Ketua Idea Project, Ashari Amrullah melalui email arieashari01@yahoo.co.id

Diskusi Praktik Cerdas

Urgensi **PERDA Kota Ternate** Tentang Penayangan **Pornografi dan Pornoaksi** **di TV Kabel**

Oleh **THAMRIN HUSAIN**



Ilustrasi Ichsan Djunaed

Menjamurnya usaha TV Kabel di Kota Ternate tidak serta merta membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan beragam anggapan bahwa isi siaran yang ditayangkan memiliki kecenderungan dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku bagi penonton, terutama anak-anak. Sebagai contoh, penayangan film dewasa di beberapa saluran televisi mulai dari adegan ciuman, pelukan dan kekerasan dapat langsung ditonton, baik itu siaran di pagi, siang, atau malam hari. Sehingga ketika menyalakan televisi, siaran seperti itulah yang kerap diakses oleh masyarakat. Melihat kondisi ini, beberapa pihak merasa perlu adanya pengaturan jam tayang di TV Kabel. Hal ini sebagai upaya dalam mengantisipasi generasi muda Kota Ternate agar tidak menjadi peniru budaya yang patuh tanpa mengkritisi dan memahami dampak negatif bagi mereka di masa depan.

Pada Diskusi Interaktif Forum Kawasan Timur Indonesia Wilayah Maluku Utara, Helmi Alhadar, Akademisi FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) berpendapat bahwa kehadiran TV Kabel di Maluku Utara selain membawa manfaat juga meninggalkan banyak mudarat. Diskusi ini diselenggarakan melalui Radio Diah 89.2 FM Ternate pada tanggal 30 Januari 2015. Helmi Alhadar juga menyatakan bahwa kini kian marak acara TV yang menyuguhkan adegan seks, kekerasan, dan tahayul. Hal ini tentu saja sangat berdampak, terlebih bagi anak-anak. Sebagai contoh, seorang anak di Rusia melakukan bunuh diri karena malu ketika diketahui sedang menonton film porno di internet. Sebuah kasus lain, seorang anak yang tega membunuh neneknya karena meniru adegan kekerasan yang ditonton dalam sebuah adegan di sebuah film.

Senada dengan Helmi, Nurlela Syarif, anggota DPRD Kota Ternate mengatakan bahwa perkembangan psikologi anak yang paling dirugikan dari penayangan acara-acara seperti ini. Anak-anak memiliki kecenderungan untuk menjadi 'peniru' dari apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Hal ini terkadang dihiraukan oleh pihak pengusaha TV Kabel demi mampu menjangkau khalayak audience yang banyak.

KPID maupun pengusaha TV Kabel memiliki peran penting dalam menyajikan siaran televisi yang mendidik terutama bagi anak-anak. Bagi Ade Rahmat dan Abi Budi Priyono, pengusaha TV Kabel, ketidaktegasan KPID dalam menegakkan aturan terkait izin penayangan menimbulkan kebingungan tersendiri. Hingga kini masih ada beberapa TV Kabel yang belum berizin dan terus

melakukan usahanya dengan aman. Penetapan batasan siaran yang berbau pornografi dan pornoaksi tidak diberlakukan menyeluruh untuk semua TV Kabel. Hal ini tentu saja merugikan TV Kabel yang memiliki izin, sebab TV Kabel lainnya yang tidak berizin dapat bebas menayangkan siaran apapun. Memang harus diakui, KPID saat ini belum maksimal melakukan pantauan atas semua siaran TV Kabel karena memiliki peralatan penunjang yang minim. "Saat ini kami hanya mengandalkan laporan dari masyarakat saja tentang keberatan atas tayangan TV Kabel," ujar Supardi dari KPID.

Tayangan pornografi dan pornoaksi jelas dilarang oleh negara. Pasal 36 Undang-Undang No. 32 tentang penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja. Penyiaran suatu acara perlu dilakukan pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Sehubungan dengan isi siaran, pada ayat 5 diatur bahwa siaran yang ditayangkan tidak boleh bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan NAPZA, dan mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Isi siaran juga wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Dalam pasal 18 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KP/03/2012 disebutkan adanya larangan dalam menayangkan adegan seksual, ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin. Peraturan ini juga memuat larangan untuk menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks, kekerasan seksual dan menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks. Pasal ini juga memuat larangan dalam menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks, adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antar binatang secara vulgar. Program siaran juga dilarang untuk menampilkan adegan ciuman bibir, mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu secara vulgar. Lebih jauh, pasal ini juga melarang untuk menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis, mengesankan ketelanjangan, ciuman bibir, dan menampilkan kata-kata cabul.

Sayangnya, semua larangan tersebut terasa mandul di Kota Ternate hingga akhirnya muncul keresahan masyarakat yang kemudian mengemuka di media cetak. Harian Malut Post Sabtu, 17 Januari 2015 memberitakan bahwa



Foto: Dok. Thamrin husaini

penayangan TV Kabel yang tak terkontrol, berdampak negatif terutama bagi anak-anak. Karena itu, butuh regulasi yang mengatur penayangan TV Kabel.

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi I dan Badan Legislasi DPRD Kota Ternate. Rapat ini sebagai upaya mendukung perlindungan kepentingan masyarakat akan kebutuhan program siaran yang layak. Melalui rapat ini mereka meminta agar segera diterbitkan regulasi mengenai penayangan TV Kabel. Dalam pertemuan itu, hadir juga wakil dari Komisi Penyiaran Daerah Maluku Utara. Menyambut usulan tersebut, Mohdar Bailussy selaku Ketua Badan Legislatif menganggap usulan yang disampaikan Prodi Ilmu Komunikasi UMMU tersebut akan dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Dukungan terhadap perlunya regulasi yang mengatur penayangan siaran di TV Kabel kembali dipertegas dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Forum Kawasan Timur Indonesia Wilayah Maluku Utara. Hardina dari KPID Maluku Utara mengingatkan agar Rancangan Peraturan Daerah

(Ranperda) ini tak tumpang tindih dengan aturan KPID dan Undang-Undang Penyiaran. Hal yang belum diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPI adalah literasi media. Hal ini menyangkut sosialisasi ke masyarakat tentang konten siaran yang layak ditonton sehingga menjadikan masyarakat 'sadar media'.

Srikandi DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, secara substantif mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) itu nantinya akan mengatur tentang retribusi untuk Pemkot dan masalah estetika kota. Selama ini hanya PLN dan Telkom yang menikmati retribusi TV Kabel karena meminjamkan fasilitas tiang kabel, listrik, dan telepon. Sementara itu, Pemerintah Kota nyaris tidak memperoleh pendapatan untuk daerah dengan adanya TV Kabel. Hal ini yang kemudian diupayakan Pemerintah Kota untuk meningkatkan nilai estetika Kota Ternate. Hal ini sesuai dengan kondisi Kota Ternate yang semakin banyak kabel listrik, telepon dan TV Kabel yang melintasi permukiman dan jalan raya. Dapat disimpulkan bahwa semua pihak harus tulus menjaga Kota Ternate. "Pengusaha untung, masyarakat juga untung. Oleh sebab itu, Perda ini harus secepatnya direalisasikan," ujar Helmi menutup diskusi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Forum Kawasan Timur Wilayah Maluku Utara, beliau dapat dihubungi melalui email di thamrin892@gmail.com

Praktik Cerdas

Memacu Ketertinggalan SPM Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia

Oleh **SUHARTO**

Lahirnya kebijakan tentang Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, telah menjadi sebuah kerangka berfikir bagi pelaksana pemerintahan di daerah. Hal ini sehubungan dengan perumusan serta memformulasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.



Foto : Ichsan Djunaed

Pemerintah daerah berhak mengawasi, serta memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Searah dengan Kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka pemerintah pusat melakukan percepatan pencapaian SNP melalui tahapan pemenuhan SPM. Bentuk konkrit yang dilakukan adalah kerjasama dengan Uni Eropa dengan implementer program ADB. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta 110 pemerintahan kabupaten dan kota.

KONDISI AKTUAL SPM PENDIDIKAN

Pemerintahan baru dibawah Jokowi-JK, melahirkan kebijakan tol laut yang memberi semangat baru bagi daerah kepulauan. Kebijakan tersebut dirasa dapat membawa perubahan dalam menjembatani akses yang terbatas dalam dunia pendidikan. Kebijakan tol laut diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi, antara lain: belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pembangunan pendidikan; belum tersusunnya landasan yuridis yang jelas tentang pengelolaan sumber daya sektor pendidikan; masih adanya pemilahan antara sekolah dibawah naungan KEMENDIKNASBUD dan KEMENAG; kurangnya kualitas sumber daya aparatur pendidikan; belum memadainya dukungan dana untuk menjalankan setiap program kerja secara maksimal; kurang adanya kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam upaya melakukan verifikasi atas setiap potensi pendidikan maupun hambatan daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Mengkaitkan kondisi tersebut dengan pokok-pokok dasar indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), ada hal-hal yang perlu dicermati, adalah sarana prasarana, sumber daya manusia, serta kunjungan pengawas yang sesuai ketentuan. Selain itu, hal yang penting menjadi indikator penilaian, antara lain: sekolah menyusun dan menerapkan

KTSP; guru membuat RPP berdasar silabus mata pelajaran; siswa menempuh pembelajaran dengan jam tatap muka yang memadai; tersedia buku pegangan dan buku pengayaan; serta supervisi akademik dari kepala sekolah. Sejauh ini, semua indikator tersebut belum ada yang terpenuhi, bahkan masih banyak yang dibawah capaian 10%.

Berdasar atas hal tersebut, hal yang perlu menjadi perhatian utama di daerah-daerah kepulauan adalah tentang masih minimnya daya dukung kebijakan sektoral tentang pendidikan. Hal ini bisa dikarenakan keterbatasan sumber daya maupun keuangan pemerintah daerah, serta dukungan langsung yang sangat minim. Sehingga dapat ditarik benang merah antara permasalahan pokok pendidikan dengan indikator penilaian dalam SPM menjadi 5 hal berikut:

PERLUASAN KETERJANGKAUAN DAN PEMERATAAN AKSES

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan prioritas nasional dalam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik.

Pengawasan dan Penjaminan Mutu secara Terprogram dengan Mengacu pada SNP Salah satu indikator pendidikan yang jauh dari SNP

Sistem pengawasan dan penjaminan mutu secara berkelanjutan masih sangat lemah. Dengan demikian, perlu dikembangkan dan dikelola mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Kegiatan utamanya antara lain: pembentukan perangkat; menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan; menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan; dan ujian nasional untuk mengukur ketercapaian standar pendidikan yang telah ditetapkan; serta pengembangan kapasitas pengelolaan pendidikan.

PENGEMBANGAN KESADARAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Pendidikan profesi guru dan sistem sertifikasi profesi pendidik akan dikembangkan, baik untuk calon guru maupun guru yang sudah bekerja. Standar profesi guru akan dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerja guru yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada kinerjanya.



TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN

Kegiatan ini berupa pengembangan sistem, metode, dan materi pembelajaran dengan menggunakan ICT. Kegiatan ini juga akan mengembangkan sistem jaringan informasi sekolah, infrastruktur dan SDM untuk mendukung implementasi, baik pada kepentingan manajemen pendidikan maupun proses pembelajaran. Tantangan yang dihadapi terkait implementasinya adalah masih banyak kecamatan yang tidak terjangkau listrik, sehingga genset menjadi pilihan alternatif. Hal menarik yang terjadi di salah satu daerah di kepulauan adalah untuk dapat saling

berkomunikasi, mereka membutuhkan biaya sekitar Rp. 1.5 juta.

PENGUATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pemerintah daerah berhak mengawasi, serta memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara, dari usia tujuh hingga lima belas tahun. Peluang bagi warga



Foto: Ihsan Djunaed

negara, dalam hal ini adalah kelompok masyarakat masih sangat luas. Namun demikian, kebijakan tata kelola serta kerjasama antara seluruh komponen masyarakat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Keberadaan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) belum menunjukkan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan indikator penunjang pendidikan, misalnya Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pengembangan kapasitas pada tingkat provinsi lebih diarahkan pada peningkatan institusi pengelola dalam melaksanakan fungsi dekonsentrasi. Dalam hal ini, kemampuan provinsi

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki wewenang dalam mengelola pelaksanaan kegiatan yang menjadi wewenang pusat. Sebagai contoh adalah pengendalian mutu, penjaminan mutu, evaluasi dan monitoring program, serta akreditasi. Kapasitas provinsi juga perlu ditingkatkan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar kabupaten/kota. Pada tingkat kabupaten/kota perlunya penguatan kapasitas menyusun kebijakan, rencana strategis, sistem informasi dan sistem pembiayaan. Upaya ini adalah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Dan pada satuan pendidikan, penguatan kapasitas tercermin dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk mencapai standar nasional pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang jauh dari SNP

Untuk meningkatkan kinerja pendidikan yang ada di daerah kepulauan, maka pemerintah seharusnya lebih memberikan perhatian kepada seluruh perangkat pendidikan yang ada di daerah kepulauan. Hal tersebut untuk menjamin terselenggaranya pendidikan secara menyeluruh dan merata kepada semua warga negara. Lebih dari itu juga untuk mendorong lembaga-lembaga donor agar berkontribusi dalam proses pengembangan pembangunan, utamanya dibidang pendidikan.

MENGAWALI PRAKTIK CERDAS

Program PKP SPM DIKDAS baru dimulai diawal tahun 2014 dengan melakukan pendataan awal. Selain itu didukung dengan melakukan diskusi ke berbagai kelompok kepentingan dan pengajuan proposal hibah. Gambaran tentang praktik cerdas belum dapat dipaparkan secara gamblang. Namun hal ini belum tentu menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat tidak memiliki keinginan kuat untuk memajukan pendidikan di daerahnya. Lebih dari itu, mereka membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk melalui pemberitaan media. Adapun praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain: keterbukaan informasi data, penerimaan beberapa program yang telah dituangkan dalam APBD tahun 2015, penambahan beberapa program untuk menunjang meningkatnya SPM, pelibatan SKPD untuk menunjang keberhasilan program, serta niat baik pimpinan dinas untuk membantu keberhasilan program.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah District Advisory Team (DAT) Program Pengembangan Kapasitas Penerapan (PKP) - SPM Region III Maluku. Penulis dapat dihubungi melalui email di suharto_adbugajinou@yahoo.co.id

Sosok

Asia,

Politisi Perempuan Peduli Kaum Marjinal

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K & MARTINA MAJID**

“Sekalipun bermaksud hanya membuat lelucon, tetap tidak boleh, ketika lelucon itu mencela, merendahkan, menstigma, mendiskriminasi orang lain, dengan latar apapun, apalagi yang direndahkan adalah perempuan dan kaum miskin”.

Itulah kata-kata yang meluncur dari Asia A. Pananrangi memprotes seorang narasumber di salah satu acara yang berlangsung di Kantor Yayasan BaKTI Makassar pada 27 Januari 2015.

Nama lengkapnya Asia A. Pananrangi. Populer dipanggil dengan nama Asia atau Andi Asia. Di Kota Watampone, Kabupaten Bone, di kalangan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Ornop (Organisasi nonpemerintah), aktivis perempuan dan anak, serta di kalangan politisi, nama Asia cukup populer. Di kalangan aktivis perempuan dan anak, nama Asia tidak hanya dikenal di Bone dan Sulawesi Selatan, tetapi juga di Indonesia.

Perempuan kelahiran Parepare, 7 April 1967 ini dikenal sebagai aktivis perempuan dan anak, serta politisi perempuan. Asia membangun basis perjuangan di daerah, yang mengantarkannya menjadi salah satu aktivis perempuan yang patut diperhitungkan. Selama sepuluh tahun (2004-2014) atau dua periode berkiprah di DPRD Bone, menjadikan Asia sebagai salah satu politisi perempuan yang berhasil menembus kerasnya

persaingan dalam dunia politik, yang didominasi oleh laki-laki, sehingga budaya politik dan hukum tidak menguntungkan perempuan.

Berangkat dari Aktivis

Tahun 1998 Asia mulai menggeluti dunia LSM sebagai aktivis. Kondisi sosial mendorong Asia terjun menjadi aktivis.



Menurutnya, Kabupaten Bone adalah satu daerah yang mempunyai penduduk miskin paling tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, banyaknya warga yang hidup tidak layak, banyaknya anak-anak tidak mengakses pendidikan, di sisi lain kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memihak pada masyarakat miskin dan marjinal, bahkan mendiskriminasi mereka.

Asia memutuskan mendirikan LSM untuk melakukan sesuatu yang bisa berguna bagi perempuan dan kaum miskin. Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone adalah institusi, di mana Asia mencoba merealisasikan pikiran-pikirannya untuk mendorong perubahan kebijakan. LPP Bone didirikan tahun 1999, yang sebelumnya bernama LPP Srikandi. LPP Bone telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional, seperti Yayasan Tifa, Komnas Perempuan, UNDP, dan The Asia Foundation.

Menurut Asia ketimpangan dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi di ranah domestik (keluarga, rumah tangga) dan publik. Perempuan dan anak adalah kelompok yang sangat rentan dan mendapat dampak langsung dari ketimpangan dan diskriminasi tersebut, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang terjadi di rumah yang pelakunya keluarga maupun di luar rumah, seperti di tempat kerja, merupakan masalah yang menjadi perhatian Asia dan LPP Bone.

Advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan—perempuan dan anak—menjadi salah satu ikon LPP Bone hingga saat. Ancaman, teror, dan intimidasi telah menjadi keseharian Asia dan LPP Bone, ketika mendampingi korban kekerasan. Perspektif HAM (hak asasi manusia), hak perempuan, dan gender merupakan pendekatan yang digunakan Asia dan LPP Bone dalam mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik litigasi maupun non litigasi.

Dalam mengadvokasi dan mendampingi korban kekerasan, yang paling sulit adalah ketika pelaku kekerasan itu adalah seorang pejabat yang memiliki banyak koneksi, sehingga menghambat proses. Namun, menurut alumni SD Negeri Ballewe dan SMP Negeri Madello Kabupaten Barru ini, hal itu justru menjadi tantangan dalam memperjuangkan hak-hak korban.

Masuk ke Dunia Politik

Asia melihat, ketimpangan yang terjadi di masyarakat, salah satunya karena kebijakan yang memang tidak memihak pada kaum marjinal dan kaum miskin. Karena itu, mengubah kebijakan



adalah salah satu yang harus dilakukan. Namun, perubahan kebijakan tidak akan berjalan baik, jika tanpa dukungan pihak legislatif. Pemikiran inilah yang mendorong alumni SMA PGRI Barru ini, masuk di dunia politik pada tahun 2004.

Keputusannya masuk di dunia politik dengan harapan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik bagi perempuan dan kaum miskin, tidak mulus. Apalagi dunia politik dianggap tabu bagi perempuan. Budaya patriarki sangat kental di masyarakat Bone dan perempuan dianggap tidak cocok menjadi pemimpin. Perempuan selalu diberi posisi tidak strategis pada berbagai institusi publik.

Dengan begitu, Asia menghadapi kondisi yang sangat berat. Masyarakat menganggap perempuan hanyalah pelengkap. Pemilih perempuan pun masih mengutamakan laki-laki. Tetapi alumni Fakultas Pertanian Universitas 45 Makassar (sekarang Universitas Bosowa 45 Makassar), sudah membuat keputusan untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa, politik bukan hanya dunia laki-laki, tetapi juga dunia perempuan, karena politik merupakan arena untuk mengubah kebijakan dan memperbaiki kondisi sosial, terutama kondisi perempuan dan masyarakat marjinal.

Tahun 2004, Asia berhasil menembus parlemen di DPRD Kabupaten Bone. Partainya, PDK menempatkannya di urutan caleg nomor 2 di Dapil (daerah pemilihan) yang memang strategis untuknya. Namun sempat dipindahkan ke Dapil



lain. Asia menolak dan melakukan advokasi ke tingkat nasional, akhirnya dikembalikan ke posisi nomor 2 di Dapil sebelumnya. Asia menjadi peraih suara terbanyak mengalahkan nomor urut 1. Namun, yang masuk ke DPRD adalah nomor urut 1. Seminggu menjadi anggota DPRD yang bersangkutan meninggal dunia. Sempat merebak rumor tidak sedap mengarah ke Asia. Tapi rumor murahan itu tidak bisa mencegah Asia ke kursi DPRD Bone 2004-2009.

Karena berlatar belakang aktivis LSM, Asia sangat akrab dengan konstituennya. Selama menjadi anggota DPRD pun, tidak ada yang berubah dari dirinya. Asia pun tetap dekat dan peduli dengan masyarakat marjinal, termasuk penderita kusta yang memang sudah dekat dengan Asia selama menjadi aktivis LSM. Asia adalah aktivis dan politisi yang tidak hanya dekat dengan penderita kusta di Bone, tetapi juga peduli dan memperjuangkan mereka. Bagi Asia, perempuan penderita kusta mempunyai beban yang lebih berat, karena dia akan mengalami diskriminasi yang berlipis, sebagai perempuan dan sebagai penderita kusta.

Tahun 2009, Asia kembali terpilih menjadi anggota DPRD. Pada periode kedua (2009-2014) sebagai anggota parlemen, Asia menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone. Selama menjadi anggota parlemen, Asia sangat fokus pada kesejahteraan rakyat. Upayanya untuk

mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan memihak pada kaum miskin terus dilakukan selama di parlemen, walaupun mendapat hambatan dari anggota parlemen laki-laki.

Pada Pemilu tahun 2014, politisi perempuan yang sudah sepuluh tahun di parlemen ini tidak terpilih. Di tengah isu politik uang yang merebak, Asia bukanlah satu-satunya politisi perempuan berpengalaman yang tersingkir. Jumlah anggota parlemen perempuan di DPRD Kabupaten Bone juga berkurang dari 9 pada periode 2009-2014 menjadi 6 orang pada periode 2014-2019.

Menurut Asia, perempuan harus diberi peran dan partisipasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan. Pemerintah harus mendukung dan membuat kebijakan yang memberi ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian, dorongan dari luar harus dilakukan terus-menerus. Karena itu, Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) yang fokus pada penguatan anggota parlemen, terutama anggota parlemen perempuan dan SKPD, akan sangat berguna bagi lahirnya kebijakan yang responsif gender dan memihak kaum miskin.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI, dan dapat dihubungi melalui email: ghufuran@bakti.or.id

WORKSHOP

Peningkatan Kapasitas Peneliti Muda



Siang itu, jam di dinding Ruangan Pertemuan, Kantor Bale Ite baru menunjukkan pukul 13.00 WITA. Satu persatu Peserta Workshop Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JikTI) mulai berdatangan. Hari ini adalah hari pelaksanaan Workshop JikTI di Kantor Bale Ite Mataram, selama 2 hari yakni tanggal 23 sampai 24 Januari 2015.

Kegiatan workshop ini diperuntukkan bagi para peneliti muda anggota JikTI di provinsi Nusa Tenggara Barat. Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah 'Mengemas Isu Pembangunan Daerah menjadi Sebuah Penelitian'.

Kegiatan hari pertama diisi oleh Bapak IGL Partanaya, P.hD yang adalah seorang peneliti madya dari Universitas Mataram. Beliau sekaligus merupakan salah satu anggota tim perumus kebijakan Pemerintah Daerah NTB yang mewakili kalangan akademisi. Dalam presentasinya, Bapak Partanaya lebih banyak membahas bagaimana sebuah penelitian yang digerakkan oleh seorang peneliti akan memberikan dampak bagi pembangunan daerah. Sebuah penelitian biasanya memiliki kekuarangan pada metode penelitiannya dan pada aspek "kebaruan" atau novelty.

Menurut Partanaya, contoh penelitian yang tidak memiliki aspek novelty adalah penelitian yang tidak mengusulkan argumen atau hipotesa baru akan suatu obyek penelitian. Bagian latar belakang penelitian merupakan komponen dari suatu penelitian yang mengungkap ada atau tidaknya aspek novelty atau kebaruan dari sebuah penelitian. Untuk itu, latar belakang penulisan proposal penelitian mempunyai peran yang besar karena merupakan kunci awal dari pembaca. Sebuah proposal penelitian yang sehat adalah yang mengandung esensi bahwa penelitian tersebut membawa sebuah kebaruan dari penelitian yang ada sebelumnya.

Lebih jauh, Partanaya mengemukakan syarat wajib yang lain dalam sebuah penelitian yaitu bahwa secara ilmiah suatu penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan, secara teknis dapat dilakukan, dan dapat diterima secara sosial. Ini berarti sebuah penelitian yang telah membuahkan hasil, semestinya tidak melanggar norma dan konteks lokal dimana penelitian dapat dilakukan, melainkan menjadi solusi aktif dalam memecahkan masalah-masalah daerah, dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat menjadi sumber rekomendasi untuk penyusunan kebijakan tingkat daerah.

Pada hari kedua, workshop dimulai oleh Dr. Firmansyah yang mengemukakan bagaimana

desain penelitian yang mampu menjawab kebutuhan Pembangunan Daerah. Firmansyah menjelaskan bahwa jumlah penelitian yang mengarahkan penelitian ke arah kontribusi pada pembangunan masih minim. Perlu dibangun pemahaman yang mengedepankan aspek kearifan lokal suatu daerah, agar bertujuan sebagai basis dari pembangunan kebijakan oleh pemerintah setempat. Tujuannya adalah agar pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan kepentingan yang diharapkan daerah.

Rekayasa sosial dalam bentuk *blue print* juga penting, itu untuk memahami karakter. Pemerintah, baik itu di pusat maupun daerah adalah sebagai perpanjangan tangan rakyat perlu didorong untuk lebih mengedepankan pembangunan manusia, yang mana perlu menjadi prioritas utama. Pembangunan dalam konteks fisik adalah perlu, namun modal sosial sebagai cerminan agenda pembangunan merupakan sumber daya utama sekaligus menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Pemateri berikut di hari yang sama adalah Bapak Mohamad Taquiuddin, Msi. Beliau membagi pengalamannya saat mendapatkan hibah penelitian dari JikTI pada tahun 2012 dan 2014, disamping hibah penelitian dari lembaga lain seperti Pertamina. Beliau menyampaikan bahwa kunci utama persiapan beliau dalam menghadapi sebuah kompetisi hibah penelitian adalah bahwa peneliti harus melihat secara seksama instruksi dari hibah penelitian yang ditawarkan. Ini penting karena hibah penelitian biasanya digerakkan oleh suatu lembaga guna membangun luaran yang bermanfaat bagi suatu daerah, baik mengedepankan solusi dalam pembangunan, maupun konteks kelokalan yang dapat menjadi masukan aktif bagi pemerintah sebagai sebuah rekomendasi. Setiap lembaga penyedia hibah mempunyai kualifikasi masing-masing dalam menentukan standar bantuan dana penelitian, serta luaran yang diharapkan untuk dapat dicapai.

Mohamad Taquiuddin membuka perspektif operasional berhasil meningkatkan antusiasme para peneliti muda anggota JikTI NTB. Mereka berharap agar lebih banyak lagi kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas para peneliti muda. Kegiatan berupa juga diskusi tematik yang membedah isu-isu dan permasalahan yang tengah dihadapi di daerah juga penting diadakan untuk menjadi kontribusi para peneliti dan akademisi JikTI NTB bagi pembangunan daerah.



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/Rio Abdul Fattah

Hibah Penelitian JiKTI 2014

Dalam upaya mengembangkan sektor pengetahuan melalui penelitian untuk kebijakan, JiKTI menggelar Hibah Penelitian bagi peneliti anggota JiKTI. Dari 116 proposal penelitian, terpilih

15 penelitian yang dianggap layak untuk mendapatkan dukungan. Kelimabelas penelitian telah diseleksi oleh Dewan Panel yang beranggotakan peneliti madya JiKTI.

Berikut 7 dari 15 penelitian yang terpilih sebagai Penerima Hibah Penelitian JiKTI 2014.

- 1 Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Strategis Akuntansi Dan Pelaporan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao**
Peneliti **Mesri Welhelmina Nisriani Manafe, SE, M.Sc**
Akademisi & Peneliti, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- 2 Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Universal Coverage Di Kota Manado**
oleh **Lingkan S. Tulung, S.Sos, M.PubPol** dan **Dr. Daud M. Liando, S.IP**
Akademisi dan Peneliti, Universitas Sam Ratulangi Manado
- 3 Persepsi dan Evaluasi Tingkat Keberhasilan Peraturan daerah (PERDA) Penertiban Hewan/Ternak Peliharaan (SK Bupati Manokwari No. 357 tahun 2004) pada Peternak Babi di Kabupaten Manokwari**
oleh **Daniel Yohanis Sesaray, S.Pt., M.Sc**, Akademisi
- 4 Peran Pemerintah Daerah Dalam Menghentikan People Smuggling/Illegal Migration (Penyelundupan Manusia/Migrasi Ilegal) Di Kabupaten Bulukumba**
oleh **Syamsul Asri, S.IP, M.Fil.I.** - Akademisi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN)

- 5 Membangun Ketahanan Komunitas Lokal Terhadap Bencana : Studi Kasus Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat di Kawasan Gunung Rinjani Lombok Timur**
oleh **Moh. Taquiddin, M.Si**
Peneliti Sosial, Lembaga KONSEPSI (Konsorium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi)
Lokasi Penelitian
Desa Sembalun Lawang, Kawasan Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 6 Pengembangan Komoditas Unggulan di Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Maluku Utara**
oleh **Chairullah Amin, SE., M.Si** - Akademisi, Universitas Khairun Ternate

- 7 Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Yang Baik & Berkelanjutan Di Provinsi Gorontalo**
oleh **Dr. Razak H Umar, S.Ag. M.Pd** (Ketua), **Dr. Sukirman Rahim, S.Pd, M.Si., Momy A. Hunowu** - Akademisi dan Peneliti Sosial, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo

Lokasi Penelitian
Kawasan Pertambangan Rakyat, Kab. Bone Bolango, Gorontalo

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Program Officer Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI). Untuk informasi mengenai kegiatan JiKTI dapat menghubungi infojikti@bakti.or.id

Artikel

A Deep Well of Experience: Supporting Indonesia's Geothermal Development

Indonesia is estimated to have the largest geothermal potential in the world - 27,000 megawatts, or roughly 40 percent of total global geothermal resources. But currently, only 4 percent of that potential is being used to produce electricity. Even at the current level of development, however, Indonesia is the third largest geothermal producer in the world in terms of installed capacity, following the United States and the Philippines. Many countries around the world are taking a close look once again at geothermal as an energy source that can deliver a "triple win" - clean, reliable, locally sourced - power generation. As previously blogged, a key barrier faced by geothermal developers is raising funds necessary to implement the early, riskier stages of a geothermal project. In addition, countries such as Indonesia have abundant and cheap fossil fuel alternatives such as coal, which can

cost less financially if the environmental and other benefits of a clean energy source such as geothermal are not taken into consideration.

<http://batukarinfo.com/node/32258>

Perikanan Berkelanjutan bagi Ketahanan Gizi Indonesia

Jakarta, Villagerspost.com - Konsumsi ikan adalah salah satu solusi masalah kurang gizi di Indonesia. Apalagi, berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2002, perairan Indonesia memiliki 8500 jenis ikan atau 45% dari jumlah spesies ikan dunia. Di antara jenis ikan tersebut adalah tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, udang, dan ikan-ikan karang semisal kerapu, baronang, dan lobster yang bernilai ekonomi tinggi.

<http://batukarinfo.com/komunitas/articles/perikanan-berkelanjutan-bagi-ketahanan-gizi-indonesia>

Referensi

Pedoman Teknis Penyusunan dan Analisa Data Terpilah untuk Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah

Publikasi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralization)

Strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tercermin pada peraturan pemerintah, seperti Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Selain itu, Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah telah mengatur pelaksanaan PUG di daerah, terkait pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, serta pengaturan tentang penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender.

<http://batukarinfo.com/referensi/pedoman-teknis-penyusunan-dan-analisa-data-terpilah-untuk-perencanaan-penganggaran-yang>

Kumpulan Policy Brief: Health Sector Review

Publikasi Australia-Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS) Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) mengkoordinasikan tersusunnya Health Sector Review (HSR). Dokumen itu merupakan kajian dalam pembangunan kesehatan yang berisikan pencapaian saat ini, tantangan yang dihadapi, pilihan kebijakan, strategi dan indikator-indikator pilihan yang disepakati.

<http://batukarinfo.com/referensi/kumpulan-policy-brief-health-sector-review>

Peluang

Beasiswa Australia Awards

Beasiswa Australia Awards periode 2015/2016 menawarkan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk meraih kualifikasi S2 dan S3 yang diakui secara internasional dari universitas di Australia. Pemerintah Australia menyediakan kesempatan ini guna mendukung dunia pendidikan dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan demi membangun kapasitas individu dalam memberikan perubahan yang positif.

<http://batukarinfo.com/news/australia-awards-scholarships-20152016>

Data Innovation Mini Grants - calls for Expression of Interest

Pulse Lab Jakarta (PLJ) and the United Nations Development Programme (UNDP) would like to announce a call for proposals for 'Data Innovation Mini Grants'. We intend to award four grants each up to USD 10,000 for innovative ways of collecting, analysing and visualising data that will help the Government of Indonesia in providing more effective services to its citizens.

<http://batukarinfo.com/news/data-innovation-mini-grants-calls-expression-interest>



Hadirnya **Pusat Data** dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah



Oleh **JUNAIDI** dan **RAHMAN RAMLAN**

Data yang akurat adalah keniscayaan yang harus tersedia demi perencanaan pembangunan yang berkualitas di setiap daerah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ir.

Wayan Darmawa, MT, Kepala BAPPEDA Nusa Tenggara Timur dalam Workshop Revitalisasi Forum Data Provinsi NTT, Januari silam. Beliau mengatakan, “Data adalah urat nadi kesejahteraan, jika urat nadi putus maka timbullah penyakit. Sama halnya dengan data, jika SKPD tidak punya data maka akan muncul permasalahan dalam pemerintahan.”

Kurangnya data pendukung dalam program pembangunan daerah dapat menimbulkan beda persepsi antar bidang dalam pemerintahan. Sehingga tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentu saja berimbas pada efektivitas dan efisiensi waktu serta penggunaan anggaran. Melihat kondisi ini,

Ir. Wayan Darmawa menyatakan bahwa perlunya membangun kepekaan pemerintah terhadap pentingnya data. Melihat kondisi ini Forum Data hadir untuk mengkoordinasikan para pemangku kepentingan dan mengkonsolidasikan metode pengumpulan data, sistem verifikasi dan validasi data.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pak Sabda, PNS senior di BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, “Psikologis alam bawah sadar kita pasti menginginkan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data. Kewenangannya lebih besar, SDM-nya juga akan lebih mendukung.” Pernyataan ini diungkapkan beliau dalam kegiatan Workshop dan Sosialisasi Hasil Kajian Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) Provinsi Jawa Timur.

Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi NTT merupakan bagian yang

Forum Data dan Informasi pembangunan adalah suatu wadah lintas pemangku kepentingan yang diharapkan dapat mencari solusi yang optimal dalam memenuhi kebutuhan data yang lebih berkualitas.

penggunaan data sebagai basis perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Termasuk dengan penyelenggaraan sistem pelayanan publik secara terpusat terhadap kebutuhan data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi dalam satu instrumen strategis pembangunan daerah, yaitu 'NTT Satu Data'.

Pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan di NTT berdasarkan Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2014. Forum Data dan Informasi pembangunan adalah suatu wadah lintas pemangku kepentingan yang diharapkan dapat mencari solusi yang optimal dalam memenuhi kebutuhan data yang lebih berkualitas. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah yang terukur dan komprehensif.

Elsye TH Hayer, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan IV BAPPEDA Provinsi NTT, dalam laporan pembukaannya menyampaikan bahwa Workshop Forum Data yang diselenggarakan itu merupakan tindak lanjut dari hasil rapat sosialisasi dan advokasi Forum Data dan Informasi Pembangunan tanggal 5 Desember 2014 silam. Workshop Forum Data dan Informasi Pembangunan ini, melibatkan Pejabat, Sekretaris, Pengolah Data dan Informasi Pembangunan di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari proses pengisian data sektoral oleh SKPD

berdasarkan surat edaran Gubernur NTT Nomor BU.124.3/54/BAPPEDA/2014 tanggal 30 September 2014 tentang penyediaan data sektoral. Pada kesempatan tersebut, dilakukan review dan evaluasi pengisian data sektoral SKPD oleh Selfi H Nange, Kasubid Data Informasi dan Analisis BAPPEDA NTT.

Guna mendukung komitmen bersama dalam hal penyediaan data, Pemerintah Provinsi NTT akan segera me-launching NTT Satu Data serta Re-Launching Pusat Data dan Informasi Pembangunan Provinsi NTT.

Usulan Pendirian UPTB Pusat Data, Jawa Timur

Usulan ini muncul dalam kegiatan Workshop dan Sosialisasi Hasil Kajian Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2) Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan atas dukungan Proyek Pengelolaan Pengetahuan BaKTI-AIPD. "Kegiatan ini sangat bagus, data adalah pintu kita melakukan perencanaan pembangunan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ida dari AIPD dan BaKTI selaku mitra pelaksana atas dukungannya," papar Bu Karimah, Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Dalam presentasinya, Yudhi Anggoro, Ketua Tim Kajian, mengemukakan bahwa mayoritas responden menginginkan adanya Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data. "66% responden menginginkan pelembagaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data agar pengelolaan data lebih efektif," ungkapnya.

Satu rekomendasi yang disepakati oleh mayoritas peserta, yakni perlunya naskah akademik yang komprehensif untuk memperkuat regulasi pendirian Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data. Naskah yang dimaksud merupakan hasil kajian yang lebih luas dan mendalam terkait pendirian Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data.





Foto: Dok. **Yayasan BaKTI/KM AIPD**

Menurut Bu Karimah, tidak sedikit implikasi pendirian Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data. “Implikasinya pada komunikasi kelembagaan, anggaran, SDM, serta posisinya. Apakah masih di bawah BAPPEDA atau kemudian diperluas sehingga mampu berkomunikasi langsung dengan SKPD?” tambahnya. Menurutnya, ketika mengajukan perda ke DPRD, naskah itu dibutuhkan sebagai justifikasi ilmiah.

Mengingat periode dukungan Proyek KM-AIPD yang akan segera berakhir, Provinsi Jawa Timur akan lebih menekankan pada revitalisasi sistem yang sudah ada. “Jawa Timur itu sudah punya forum data, punya software pusat data. Itu dulu saja direvitalisasi, sambil menyiapkan naskah akademiknya. Insyaallah, jika ada AIPD jilid dua, kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) akan kita dukung,” ungkap Purwida Lilik Haryati, Assistant Program Director AIPD Jawa Timur.

Forum Data di Nusa Tenggara Timur dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data Jawa

Timur ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam memandang data sebagai sebuah penunjang dalam pelaksanaan pembangunan. Data tidak hanya dipandang sebagai sebuah kumpulan angka, namun juga menjadi dasar dalam mengambil sebuah kebijakan di pemerintahan. Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) melalui KM-AIPD mendukung penuh upaya ini guna meningkatkan pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat.

Pusat Data juga dapat menjadi wadah bagi para praktisi pembangunan di suatu daerah untuk saling berkoordinasi. Sehingga program yang mereka implementasikan di suatu daerah tidak saling tumpang tindih, melainkan dapat terjalin kerjasama yang baik antar praktisi pembangunan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program KM-AIPD dapat menghubungi Stevent Febriandy melalui email di sfebiandy@bakti.or.id

Peluang

"COOL WEATHER BUT WARM PEOPLE"

Even more beautiful
than what books or
people have described



These are just some of the words used by two current New Zealand ASEAN Scholarships (NZ-AS) Awardees from Eastern Indonesia to describe their first impressions of New Zealand. Jermi Haning, Director of BAPPEDA in Rote Ndao, NTT

Province, is currently completing a PhD in Environmental Planning at Massey University, Palmerston North campus. Cornelia Matani, a Lecturer Assistant at the School of Accounting at Cenderawasih University in Jayapura, is currently completing a Masters degree in Business Studies majoring in Accounting at Massey University's Auckland campus. Bhakti interviewed them recently to find out more about their experiences both in applying for a New Zealand ASEAN Scholarship as well living and studying in New Zealand.

Deciding where to study

Each of the Awardees approached this differently. Because Cornelia was planning to do a Masters degree in accounting by research, she first surveyed all the universities in New Zealand that offered this programme and then identified those that offered a masters by research.

"I found that the University of Auckland, Massey University and Victoria University of Wellington all offered this option and are among the top 100 universities globally in this field. I chose to apply to both Victoria and Massey universities, and finally my application was accepted by Massey University."

As Jermi was planning to study for a PhD, he took a different approach. "Because I had to find lecturers who are experts in my area of study and who were willing to supervise my research, I initially tried to find a suitable supervisor rather than choosing the university first."

Facing initial challenges: Both of them arrived in New Zealand during the summer, but were not



expecting such cold temperatures at this time of year. "The moment I came out from the airport building, I felt the cold wind blowing hard and I couldn't sleep that first night with only a single blanket to keep me warm," Cornelia said. Jermi found the best way to deal with the cold was to put on several layers of clothes. "My wife saw photos of me and said that the clothes made me look like an astronaut."

Once at their universities, they also faced some challenges in adjusting to their new academic lives as well. For Jermi, the main challenge was learning to write concisely and properly in English, and he managed to improve his writing by taking



advantage of the service provided by the Learning and Teaching Centre on his campus, which offered one hour of individual tutoring support each week. He also attended academic writing and research workshops that were sometimes held at the university. Jeremi's efforts were rewarded when he easily passed the two papers required in order to qualify for entry to his PhD programme.

For Cornelia, one of the biggest academic challenges was having to think and write more critically. "I was not that critical because it is not in my culture to question or argue my own point of view, but all my papers require me to be critical." To overcome this challenge, she read as much as she could on critical writing as well as attending workshops on campus designed to help students think more critically. This effort paid off and she

received an A+ in one of her presentations in class where she had to critique an accounting article.

Leisure

Maintaining a healthy work-life balance is important for everyone, including NZ-AS Awardees, and New Zealand provides many opportunities for recreation. On weekends, Cornelia likes to visit nearby places, especially beaches. "Auckland has many beautiful beaches, similar to my hometown of Jayapura. The difference is that the water is cold even in summer, but the beaches are perfectly safe, people are friendly and there are great public facilities." Her most memorable trip was to visit Hobbiton Village not far from Auckland, where several Lord of the Rings movies were filmed. "It was easy to plan the trip by ourselves using the



internet. I went there with a friend and we travelled by bus. I was very impressed and could not stop taking pictures and enjoying the beautiful scenery of New Zealand."

As a PhD student, Jermi has found little time so far for activities other than studying, though he has joined the International Student's Association on campus which has enabled him to join some activities, including a visit to the ski fields on Mt Ruapehu, as well as join cooking lessons.

Working while studying

The New Zealand ASEAN Scholarships programme permits Awardees to work up to 20 hours per week, provided this does not have a negative impact on their studies. Cornelia has taken several part-time jobs so far, mostly tutoring

other students who have to take courses in accounting. "I tutored an undergraduate student from Samoa twice a week for almost three months, and then I tutored a student from Papua New Guinea who I helped with her studies in business research twice a week. For these jobs, I was paid NZ\$20 per hour. My Professor also hired me as an assistant on a short training of trainers course for staff from Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) who were on a study tour to New Zealand from Indonesia."

Jermi decided his first priority was to focus on study and meeting the entry requirements to his PhD programme. He says he will consider working in future if the work relates to his research topic or academic skills. "As NZ-AS sets high academic standards for Awardees, study should be the first priority, while work is additional. However, it will provide valuable opportunities to learn and understand more about the life of New Zealanders."

Bringing family to New Zealand

Neither Cornelia or Jermi have family with them in New Zealand, though Jermi plans to bring his wife and children to New Zealand in early 2015. He has already started to gather information regarding schools and day care possibilities in Palmerston North and there are several possibilities. He has this advice for anyone planning to bring their family to New Zealand..." Learning from my first six months experience here, I believe it is much better that the families join the Awardees later after they have settled in and become better prepared for their families to join them."

Jermi's final words of advice for those thinking of applying for a New Zealand ASEAN Scholarship? "I believe that if an islander like me living in Rote can get a scholarship to study in New Zealand, then those in the other parts of the country with better access to information can certainly do this as well. The keys are believing you can achieve it, making the effort and networking." Cornelia advises those interested in applying that, "...if you are thinking of applying for a New Zealand ASEAN Scholarship, don't leave it to the last minute. Actively seek out more information through the internet and social media as well as by contacting Alumni directly."

The deadline for applications for a New Zealand ASEAN Scholarship for study starting next year is 30 April 2015. For more information and an application form, go to www.aid.govt.nz

Anggota Parlemen Pembelajar

Oleh **M. Ghufan H. Kordi K.**

Saat menyebut nama parlemen, baik DPR, DPRD maupun DPD, yang muncul di benak kita bermacam-macam. Namun yang paling umum adalah bayangan tentang institusi parlemen berisikan orang-orang terhormat. Parlemen adalah salah satu tiang demokrasi menurut trias politika klasik bersama eksekutif dan yudikatif. Parlemen mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Seleksi anggota parlemen berbeda dengan seleksi eksekutif dan yudikatif, yang prosesnya lebih terukur dengan penjenjangan karir yang bertingkat. Seleksi anggota parlemen dilakukan oleh pemilih dalam Pemilu (pemilihan umum), yang kemungkinan melahirkan anggota parlemen yang berkualitas atau sangat tidak berkualitas. Cerita lucu, konyol, dan memalukan terkait anggota parlemen sudah umum di negeri ini.

Itulah fakta yang harus diterima. Tidak adanya sistem dan standar rekrutmen pada partai politik, ditengarai sebagai biang munculnya anggota parlemen yang tidak sesuai dengan kebutuhan terkait dengan tugas dan fungsi anggota di parlemen. Menjadi politisi juga bukan sebagai salah satu profesi yang dijalani sepenuhnya oleh sebagian anggota parlemen. Ada anggota parlemen yang melihat peluang dan kemudian mencoba peruntungan, dan kemudian terpilih.

Dengan begitu menjadi anggota parlemen bukan sebagai kelanjutan dari sebuah proses yang dijalani sebelumnya, tetapi secara kebetulan terpilih dari berbagai upaya dalam memburu peruntungan. Tentu itu tidak salah dari sisi mencari pekerjaan untuk menyambung hidup. Masalahnya adalah anggota parlemen yang dihasilkan dalam Pemilu adalah politisi-politisi karbitan dengan kualitas di bawah standar.

Anggota parlemen di daerah, baik anggota DPRD Provinsi maupun anggota DPRD Kabupaten/Kota, kerap kali lebih memprihatinkan. Banyaknya Perda yang dibatalkan Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu ukuran, betapa



Foto-foto: Dok. **Yayasan BaKTI/Junardi Jufri**

rendahnya kualitas anggota parlemen di daerah.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota parlemen. Namun, tidak semua anggota parlemen peduli dan serius dengan peningkatan kapasitas. Anggota parlemen lebih ingin berwisata-rekreasi dengan nama studi banding dan konsultasi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota parlemen tidak menarik bagi mereka. Selain kapasitas belajar sebagian anggota parlemen yang pas-pasan, metode yang digunakan juga menjadi kendala dalam peningkatan kapasitas anggota parlemen. Bimbingan teknis (Bimtek) yang bertujuan meningkatkan anggota parlemen, ternyata membosankan bagi banyak anggota parlemen karena metode satu arah atau ceramah. Metode tersebut oleh sebagian besar anggota parlemen, bukan hanya tidak menarik, tetapi juga tidak banyak membantu peningkatan kapasitas anggota parlemen (LSKP, 2013). Bimtek selama ini tidak lebih dari rutinitas, sekadar menggugurkan

kewajiban, dan menghabiskan anggaran.

Namun, harapan terhadap anggota parlemen selalu ada. Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare terdapat pembelajaran yang baik mengenai anggota parlemen yang selalu aktif untuk meningkatkan kemampuannya. Anggota parlemen di DPRD Parepare aktif mengikuti kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan pemerintah dan DPRD maupun yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah.

Anggota parlemen di DPRD Parepare dapat disebut sebagai anggota parlemen pembelajar—meminjam istilah Andreas Harefa. Selama ini informasi mengenai anggota DPRD Parepare, khususnya terkait dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan dan mengadopsi pembelajaran yang baik, perlu diapresiasi.

Belajar dari Mitra

Sangat jarang ditemukan anggota DPRD secara kolektif duduk berjam-jam mendengarkan presentasi dari seorang kepala dinas yang

merupakan bawahan walikota atau seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non-Pemerintah. Hampir tidak ditemukan anggota DPRD dalam jumlah besar yang berasal dari satu daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang mengikuti workshop atau pelatihan dan mampu bertahan duduk sebagai peserta selama 1-2 hari, tidak selalu menghilang dengan berbagai alasan atau menghilang tanpa diketahui. Yang umum terjadi adalah menghilang tanpa diketahui oleh panitia.

Tapi itu berbeda, jika kegiatan itu diikuti oleh anggota DPRD Parepare. Diskusi yang dilakukan oleh LSM atau wartawan dihadiri oleh anggota DPRD Parepare. Jumlah yang hadir sesuai dengan yang diminta oleh pelaksana. Selama diskusi berlangsung, sangat jarang anggota DPRD meninggalkan kegiatan, apalagi dengan menghilang tanpa diketahui oleh pelaksana.

Mereka juga cukup terbuka menerima masukan dari berbagai mitra. Tata Tertib DPRD yang Transparan Akuntabel dan Partisipatif (TAP) telah dikembangkan oleh DPRD Parepare sejak periode 2009-2014 adalah salah satu contohnya. Demikian juga Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat (PPBM) menjadi sebuah pembelajaran yang baik mengenai Musrenbang Partisipatif. Perda PPBM memberi ruang partisipasi perempuan sebagai peserta musrenbang sebesar 30 persen.

DPRD Parepare belajar dari pengalaman berbagai pihak, baik LSM maupun pemerintah, sehingga akhirnya mengesahkan Perda PPBM. Padahal Perda tersebut juga mencegah anggota DPRD dalam mengatur "anggaran titipan" di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang sudah dikenal umum di negeri ini.

Belajar dari Pemerintah

Posisi yang setara antara DPRD dan Pemerintah Daerah (gubernur atau bupati/walikota) menjadikan kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan unit kerja dalam posisi sulit. Sudah menjadi rahasia umum, kepala SKPD atau nit kerja tidak hanya segan, tetapi juga takut kepada anggota DPRD. Karena itu, hampir tidak ditemukan, seorang kepala SKPD di kabupaten/kota menjadi narasumber untuk kegiatan yang dihadiri oleh anggota DPRD kabupaten/kota. Karena yang terjadi adalah, kalau bukan narasumber yang demam panggung, maka anggota DPRD yang menghilang. Anggota DPRD bisa bertahan pada rapat-rapat kerja, di mana posisi mereka adalah yang mengadili atau mengoreksi Pimpinan SKPD.

Tapi ini tidak terjadi di Parepare. Berbagai kegiatan untuk anggota DPRD Parepare menjadikan kepala SKPD sebagai narasumber. Pada Desember 2014 YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat) Parepare bekerjasama dengan DPRD Parepare melaksanakan Workshop Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) anggota DPRD. Kegiatan yang didukung oleh Program MAMPU-Yayasan BaKTI ini juga menjadikan Kepala Inspektorat Kota Parepare, Muh. Husni Syam sebagai salah satu narasumber.

Saat penyajian materi dari Kepala Inspektorat Kota Parepare, anggota DPRD yang mengikuti dan menyimak pemaparan narasumber, tidak ada anggota DPRD yang meninggalkan tempat kegiatan. Padahal Workshop ini dilakukan di Kota Parepare yang memungkinkan anggota DPRD mempunyai banyak alasan untuk meninggalkan tempat workshop.

Hanya anggota DPRD yang mau belajar yang bisa duduk mendengar narasumber yang posisinya lebih rendah atau setara.

Belajar dari Konstituen

Anggota DPRD Parepare juga dikenal selalu belajar bersama konstituen. Ketika menghadiri musrenbang di kelurahan atau kecamatan, beberapa anggota DPRD Parepare dikenal sebagai peserta setia, tidak meninggalkan kegiatan hingga selesai. Mereka mendengar dan mencatat usulan-usulan dari peserta.

Warga jarang mengeluhkan kehadiran anggota DPRD yang hadir dan menghilang. Memang Parepare adalah wilayah kota yang memungkinkan anggota DPRD secara mudah mendatangi setiap kelurahan untuk mengikuti musrenbang. Tetapi duduk bersama warga selama kegiatan berlangsung secara partisipatif adalah pekerjaan sulit. Namun, bagi sebagian besar anggota DPRD Parepare tetap bertahan dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut merupakan hal biasa.

Kantor DPRD Parepare juga sangat akrab dengan konstituen. Di tempat lain, kantor DPRD hanya didatangi oleh pendemo. Di Parepare, kantor DPRD menjadi tempat konstituen untuk mengadukan berbagai masalah. Anggota DPRD Parepare mudah ditemui oleh konstituen. Tentu ini tidak terlepas dari keinginan anggota DPRD untuk selalu belajar.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Program MAMPU-BaKTI, Anda dapat menghubungi Program Manager MAMPU melalui email lpalulungan@bakti.or.id



Kegiatan di BaKTI

Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Yayasan BaKTI) Makassar bekerjasama dengan Rumah Ide Makassar menggelar Pemutaran Film dan Diskusi yang akan membahas film *Chronicle Of A Summer*. Sebuah film dokumenter yang dirilis pada tahun 1961 ini merupakan bentuk film dokumenter partisipatori. Film dokumenter partisipatori merupakan sebuah film yang menggali informasi dari objek atau subjek melalui sebuah riset. Dapat dikatakan bahwa Rouch dan Morin memasukkan karakter-karakter dalam film ini sebagai penghidup film dokumenter yang mereka buat.

Jenis film dokumenter ini berbeda dengan dokumenter yang lain yang mana obyek yang diangkat hanya sebatas menjadi obyek saja. Diskusi ini dihadiri oleh peserta yang merupakan pegiat film dan penikmat film-film dokumenter.

13 Februari 2015

Pemutaran Film dan Diskusi : Chronicle Of A Summer



17 Februari 2015

Diskusi Inspirasi BaKTI "Gerakan Kembali Bersekolah- Program Inovasi Polres Mamuju"

Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Yayasan BaKTI) Makassar kembali menggelar Diskusi Inspirasi BaKTI. Mengangkat tema "Gerakan Kembali Bersekolah", BaKTI menghadirkan

Kapolres Mamuju, Bapak AKBP Eko Wagianto. SIK sebagai narasumber pada diskusi kali ini. Program ini didasari pada fakta terkait tingginya angka putus sekolah, yang mana hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kriminalitas.

Polres Mamuju bekerjasama dengan LSM Yayasan Karampuang serta dukungan UNICEF mewujudkan gerakan ini dalam upaya menurunkan angka putus sekolah bagi anak-anak. Dalam diskusi ini Bapak Eko Wagianto juga menampilkan dokumentasi singkat tentang kegiatan yang dilakukan di GKB melalui video.

Diskusi ini dihadiri oleh 40 peserta yang berasal dari pihak kepolisian di Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah, LSM, mitra pembangunan internasional, dan media.

18 Februari 2015

Diskusi Media "Pluralisme dalam bingkai Media"

Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan kembali menggelar Diskusi Media di Kantor BaKTI. Diskusi kali ini mengangkat tema Pluralisme dalam Bingkai Media.

Diskusi ini menghadirkan pemateri, yaitu Dr. Hurriah Ali Hasan (Sosiolog), Upi Asmaradana (Pengurus Aliansi Jurnalistik Indonesia), dan Yongris Lao (Wakil Ketua Walubi Sulawesi Selatan). Tema kali ini membahas berbagai tema urgensi media dalam berbagai lingkup kehidupan sosial di masyarakat, dimana media mampu menjadi wadah dalam menampilkan keberagaman tersebut.

Hadir sebanyak 20 peserta yang berasal dari rekan jurnalis, aktivis dan pegiat sosial di Sulawesi Selatan.





Membership Fundraising

PENULIS Herri Setiawan, Yuni Kusumastuti dan Hamid Abidin
PENERBIT PIRAC

Buku ini memaparkan teknik penggalangan dana melalui skema keanggotaan. Di dalamnya anda akan menemukan panduan praktis dalam menyusun metode penggalangan dana melalui skema tersebut. Selain menampilkan panduan praktis, buku ini juga akan berisi tips-tips singkat dalam menyusun keanggotaan, pengalaman dari lembaga sosial lainnya dalam menerapkan strategi tersebut melalui studi kasus yang dilakukan oleh PIRAC.



Statistika untuk Penelitian

PENERBIT Prof. DR. Sugiyono **ISBN** 978-979-843-3-108

Buku ini merupakan salah satu buku yang dapat dijadikan bahan rujukan bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan melakukan penelitian. Buku ini memuat hal-hal dasar dalam statistika, mulai dari penjelasan jenis-jenis data sampai pada jenis-jenis metode penelitian. Selain itu, setiap bab disertai dengan contoh soal yang penyelesaiannya runtut dan mudah untuk dipahami. Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu statistika secara mandiri/autodidak.



Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah

PENULIS Anita Muhammad Firdaus **ISBN** 978-602-1568-05-7

Budaya organisasi merupakan fondasi sebuah organisasi. Namun karena berada pada dimensi implisit organisasi, budaya kerja sering luput dari perhatian. Buku ini menyajikan langkah demi langkah cara menggali, mengembangkan dan mengefektifkan nilai-nilai dasar budaya kerja dalam instansi pemerintah. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman PKP2A II Lembaga Administrasi Negara dalam membangun budaya kerjanya dan pengalaman berbagai organisasi pemerintah dan swasta yang memiliki kisah sukses dalam mengembangkan budaya kerja. Isi buku juga sudah diujicobakan di salah satu instansi pemerintah dengan hasil yang sangat memuaskan.



Menolak Tumbang: Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan

PENULIS Lies Marcoes-Natsir **ISBN** 978-602-838-4-803

Melampaui kajian-kajian tentang kemiskinan dan gender yang lazim, buku ini merekam kekuatan dan ketangguhan perempuan menolak dan melawan proses-proses pemiskinan mereka. Perlawanan mereka berlangsung lama, di mana-mana, di semua sektor, dalam berbagai bentuk dan cara. Tetapi, tanpa dukungan dan pengorganisasian yang baik, perlawanan itu bisa jadi hanya bersifat seketika dan tak terarah.